



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM KABUPATEN  
BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, guna kelancaran operasional sekolah dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Sekolah (DOS) dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Pemerintah.....



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 74).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyelenggaraan Dana Operasional Sekolah (DOS) SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2 tanggal 27 Desember 2018.

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGUNAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dana Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat DOS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Tenaga Pendidik adalah tenaga guru yang berkualifikasi akademik sebagai guru dalam penyelenggaraan pendidikan
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari

**BAB II**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Tujuan Program DOS adalah:

- a. untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain; dan
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan dan penuntasan Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun yang bermutu.

**Pasal 3**

Sasaran Bantuan DOS adalah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya pada Sekolah Negeri dalam Kabupaten Batang Hari yang meliputi: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap.

**BAB III.....**



### **BAB III**

#### **PENERIMA DANA OPERASIONAL SEKOLAH**

##### **Pasal 4**

Penerima DOS untuk tiap-tiap sekolah dihitung berdasarkan kebutuhan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya sesuai dengan jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah jam perminggu serta jumlah PNS yang ada.

### **BAB IV**

#### **PENGUNAAN**

##### **Pasal 5**

DOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam bentuk honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya guna menjamin kesinambungan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

### **BAB V**

#### **KOMPONEN DANA OPERASIONAL SEKOLAH**

##### **Pasal 6**

Bantuan DOS mencukupi komponen yaitu Dana Operasional untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar yaitu pembayaran honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya.

##### **Pasal 7**

Bantuan DOS untuk kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri, Honor diberikan untuk:
  - 1) Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar Guru Kelas sebesar Rp.700.000,-orang/bulan.
  - 2) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama sebesar Rp.8.000,-perjam pelajaran.
  - 3) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Olahraga dan Kesehatan sebesar Rp.8.000,- perjam pelajaran.
  - 4) Operator Sekolah sebesar Rp.550.000,-orang/bulan;
  - 5) Pelayan sekolah sebesar Rp. 550.000,-orang/bulan; dan
  - 6) Satpam Sekolah sebesar Rp.550.000,-orang/bulan;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Honor diberikan untuk:
  - 1) Guru Tidak Tetap (GTT) Guru semua mata pelajaran sebesar Rp.8.000,- perjam pelajaran.
  - 2) Operator Sekolah sebesar Rp.700.000,-orang/bulan;
  - 3) Tata Usaha Sekolah sebesar Rp.550.000,-orang/bulan;
  - 4) Tenaga Perpustakaan Sekolah sebesar Rp.550.000,-orang/bulan;
  - 5) Pelayan sekolah sebesar Rp. 550.000,-orang/bulan; dan
  - 6) Satpam Sekolah sebesar Rp.550.000,-orang/bulan;

c. Sekolah Menengah Pertama.....

- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri, Honor diberikan untuk :
- 1) Guru Tidak Tetap (GTT) semua Guru mata pelajaran sebesar Rp.8.000,- perjam pelajaran.
  - 2) Operator Sekolah sebesar Rp.700.000,-orang/bulan;
  - 3) Tata Usaha Sekolah sebesar Rp.550.000,-orang/bulan;

#### **Pasal 8**

Jika terdapat kelebihan dan keterlanjuran pembayaran akan dikembalikan ke Kas Negara/Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Guru Tidak Tetap (GTT) pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berhak mendapatkan Honor dengan ketentuan :
  - a. guru Kelas apabila sekolah tersebut kekurangan Guru Kelas PNS dengan minimal mengajar 22 (dua puluh dua) Jam per minggu;
  - b. guru Agama apabila sekolah tersebut tidak memiliki/kekurangan guru Agama PNS; dan
  - c. guru Olahraga apabila sekolah tersebut tidak memiliki/kekurangan guru Olahraga PNS
- (2) Guru Tidak Tetap (GTT) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang berkualifikasi S.1 harus mampu mengampu mata pelajaran yang diajarkan, apabila sekolah tersebut tidak memiliki/kekurangan guru mata pelajaran yang PNS.
- (3) Guru Tidak Tetap (GTT) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap yang berkualifikasi S.1 harus mampu mengampu mata pelajaran yang diajarkan, apabila sekolah tersebut tidak memiliki/kekurangan guru mata pelajaran yang PNS.
- (4) Pegawai Tidak Tetap (PTT) meliputi Tata Usaha Sekolah, Operator Sekolah, Tenaga Perpustakaan Sekolah, Pelayan Sekolah dan Satpam Sekolah tersebut apabila;
  - a. Tidak memiliki Tata Usaha/Operator Sekolah yang PNS serta kekurangan Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. Tidak memiliki Tenaga Perpustakaan Sekolah PNS;
  - c. Tidak memiliki Pelayan Sekolah PNS;
  - d. Tidak memiliki Satpam Sekolah PNS, apabila sekolah tersebut dilewati Jalan Lintas.

### **BAB VI**

#### **PENETAPAN PENERIMA DANA DOS**

##### **Pasal 10**

Penetapan penerima honor dari dana DOS berdasarkan :

- a. usulan dari Kepala Sekolah;
- b. hasil verifikasi dari petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari; dan
- c. telah melakukan kontrak kerja dengan Kepala Sekolah.

##### **Pasal 11.....**



### **Pasal 11**

Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dibayar dari Dana DOS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

### **Pasal 12**

Penerima honor dari dana DOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibatalkan apabila :

- a. mengundurkan diri sebagai Guru Tidak Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap;
- b. meninggal dunia;
- c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kontrak kerja yang telah disepakati; dan
- d. adanya Guru atau Pegawai yang berstatus PNS yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB VII**

### **WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 13**

Waktu pelaksanaan penggunaan DOS adalah 1 (satu) tahun Anggaran selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran berjalan.

## **BAB VIII**

### **SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN**

#### **DANA OPERASIONAL SEKOLAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Sistem dan prosedur pengajuan permintaan pembayaran dan penyaluran DOS berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati Batang Hari melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka Dana Operasional Sekolah disalurkan ke rekening masing - masing Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Honorarium dari Dana DOS melalui Bank Jambi Cabang Muara Bulian.

## **BAB IX.....**

## **BAB XIV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 20**

Sanksi terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan Negara, Sekolah atau siswa akan dijatuhkan oleh Aparat/ Pejabat yang berwenang, sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang terdiri dari :

- a. penerapan sanksi Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penerapan tuntutan Perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. penerapan proses hukum; dan
- d. pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan menghentikan sementara pada tahun berikutnya jika terbukti terdapat pelanggaran yang secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

#### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 25 - 2 - 2019

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 25 - 2 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2019 NOMOR : 19